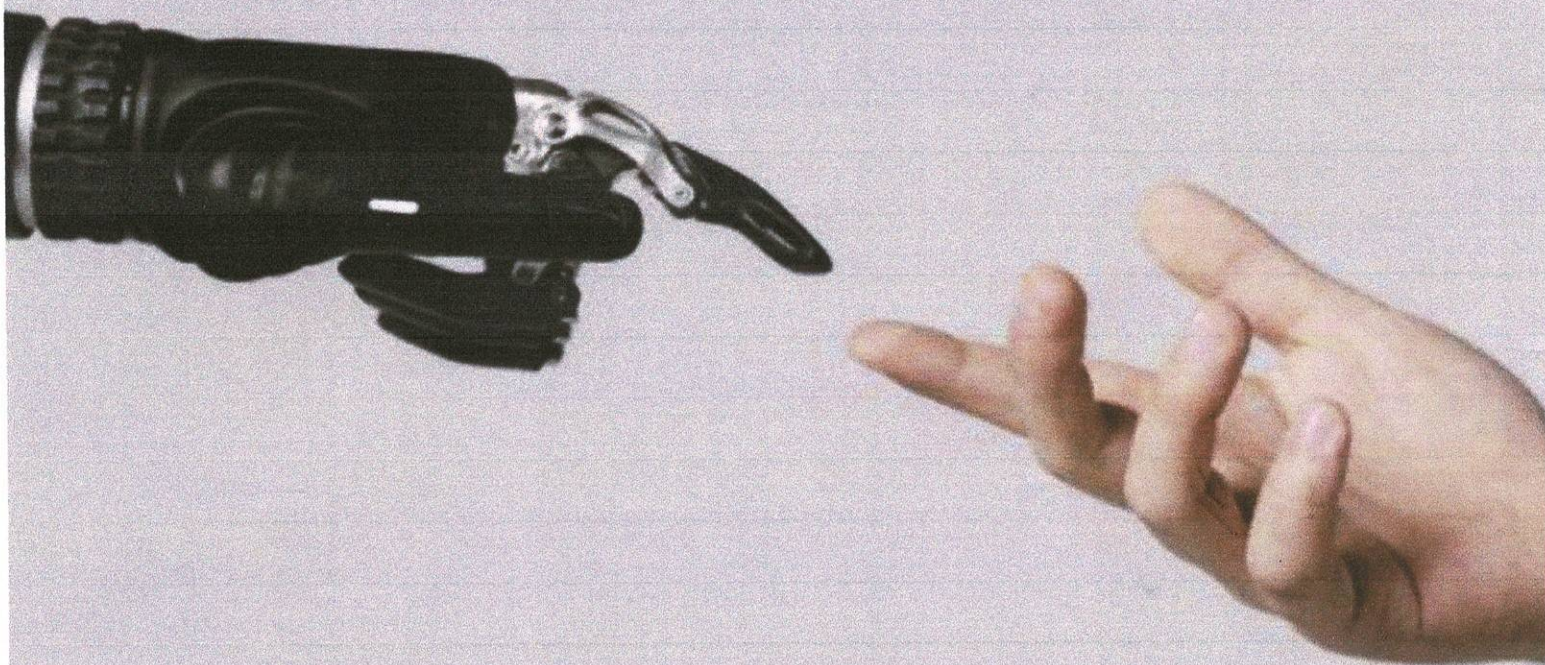


**RENCANA KERJA 2027
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG**



MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA DINKOMINFO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINKOMINFO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027

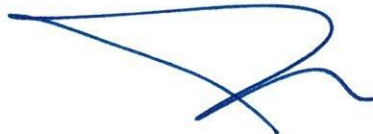
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 5 Juli 2026

Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan



Ewiek Khavida, S.STP, MM
NIP. 198311182002122001

Petugas Verifikator,



Aziz Sugiharto, S.AP
NIP. 197810041997031001

Mengetahui,

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

Rencana Kerja Tahun 2027 merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkan Rencana Strategis Dinkominfo Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 dan hasil evaluasi program kegiatan pada tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak dijumpai kekurangan disana sini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan pada masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2027 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, Juli 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung,



Gotri Wijanto Wuriatmojo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197712121997031006

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Verifikasi	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO	 10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2025	10
dan Capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2025-2029	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan	50
Fungsi Dinkominfo	
2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD	56
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	56
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	64
2.7 Inovasi Perangkat Daerah	64
2.8 Penghargaan	66
 BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	 67
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	67
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinkominfo	69
3.3 Program dan Kegiatan Dinkominfo	72
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 79
4.1 Program dan Kegiatan	79
 BAB V. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 84
5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027	84
5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027	84
 BAB VI. PENUTUP	 87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun 2026 Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.3 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.4 : *Review* terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027
- Tabel 2.5 : Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Temanggung
- Tabel 2.6 : Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2023-2026
- Tabel 2.7 : Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026
- Tabel 3.1 : Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2027
- Tabel 3.2 : Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kab. Temanggung Tahun 2027
- Tabel 4.1 : Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kab. Temanggung Tahun 2027
- Tabel 5.1 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2027
- Tabel 5.2 : Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

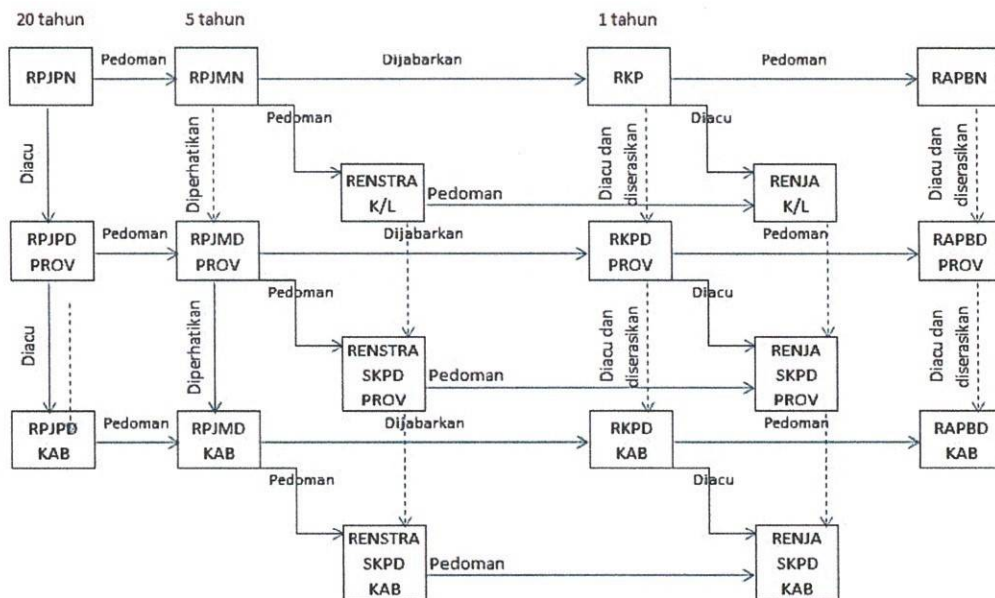
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Dinkominfo Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja Dinkominfo Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinkominfo Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinkominfo, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinkominfo, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinkominfo;
- 2) Kondisi pelayanan Dinkominfo;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinkominfo;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinkominfo;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinkominfo.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinkominfo

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinkominfo adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinkominfo;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinkominfo untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi Triwulan I tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2026;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinkominfo.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun lalu berdasarkan Renstra Dinkominfo

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 4) *Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinkominfo. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 5) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025;
- 6) Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi urusan terkait).

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinkominfo dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinkominfo tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinkominfo;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinkominfo;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinkominfo sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinkominfo.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinkominfo dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinkominfo;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinkominfo;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinkominfo;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinkominfo.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- 1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- 2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- 3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinkominfo.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkominfo.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinkominfo

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinkominfo merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan,

terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinkominfo

Penyempurnaan rancangan Renja Dinkominfo perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

1. Pembahasan Forum Perangkat Daerah

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinkominfo dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinkominfo dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah

Dokumen rancangan Renja Dinkominfo yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinkominfo Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinkominfo untuk Tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinkominfo Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo selama kurun waktu Tahun 2027;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2027;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinkominfo Tahun 2027; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinkominfo Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinkominfo Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2025-2029

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu sampai dengan Triwulan I Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinkominfo sampai dengan tahun berjalan terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan dengan menggunakan capaian kinerja Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinkominfo 2025-2029. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d Triwulan I Tahun 2026 Kabupaten Temanggung

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	RP. (DPA)	K	RP.	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika										
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6.199.307.537		1.453.381.821	
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100	100	100	100		100		100%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.028.710.047		1.118.463.019	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	40	40	100	44	4.028.710.047	44	1.118.463.019	100%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tunjangan ASN						487.638.000		3.404.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Orang/ Bulan	7000	7.000	100	7000	487.638.000	-	3.404.000	0%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peraturan Perundang-Undangan						218.063.196		5.173.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5	5	100	4	4.738.500	-	-	0%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	3	100	5	58.020.446	1	1.750.000	20%

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	RP. (DPA)	K	RP.	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	-	-	-	3	47.989.250	-	-	0%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12	12	100	6	20.900.000	-	-	0%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	12	12	100	12	9.025.000	-	-	0%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	100	12	26.577.000	3	1.390.000	25%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	100	12	50.813.000	3	2.033.000	25%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.309.883.844		320.779.802	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	laporan	12	12	100	12	530.000	-	-	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100	12	6.650.000	3	1.325.522	25%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100	12	13.308.360	3	1.440.000	25%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	100	12	1.289.395.484	3	318.014.280	25%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							155.012.450		5.562.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	25	25	100	26	155.012.450	4	5.562.000	15%

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	RP. (DPA)	K	RP.	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
B	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik					100		543.500.000		36.739.260	
		Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	85,5	85	100	85,75		85,29		99,46%
		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	100	556	100	100		70,20		70,20%
		Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	90	100	100	100		100,00		100%
		Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik	%	15	29	100	17,5		28,74		164%
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							543.500.000		36.739.260	
	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik					20,00	32.500.000	5	0	25%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dok	12	12	100	52,00	511.000.000	12	36.739.260	23%
C	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					100		1.520.718.800		6.800.000	
		Persentase layanan publik secara elektronik	%	55	56	100	75,00		55,73		74,31%
		Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	%	100	100	100	37,68		100		100%
		Persentase rumah tangga dengan akses internet	%	91	94	100	91,50		94,24		100%

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	RP. (DPA)	K	RP.	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							353.500.000		-	
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah Serta Domain Pemerintah Desa					2	353.500.000	0	0	0%
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1.167.218.800		6.800.000	
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemkab/Kota yang terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	PD	46	46	100	46	1.102.852.000	46	6.800.000	100%
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah layanan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas					3	64.366.800	0	0	0%
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							15.000.000		-	
		Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)	Angka	40	74	100	50		74,40		100%
		Ketersediaan data statistik sektoral	%	74	100	100	100		30,28		30,28%
a	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							15.000.000		-	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dok.	5	5	100	-	-	-	-	0

No	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	RP. (DPA)	K	RP.	
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9	10	11	12=10/8
	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	%	5	12	100	100	15.000.000	-	-	0%
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							317.499.600		300.000	
		Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	300	548	100	300		548		100%
		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	100	100	100	100		17,65		17,65%
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							317.499.600		300.000	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis elektronik dan non elektronik	laporan	12	12	100	12	300.000.000	3	200.000	25%
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	PD	46	46	100	46	17.499.600	46	100.000	100%
JUMLAH								8.596.025.937		1.497.221.081	

Sumber: Dinkominfo Kabupaten Temanggung, 2026